

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting yang digunakan untuk menilai kinerja perekonomian di suatu wilayah. Menurut Sukirno, (2008) pertumbuhan ekonomi dapat menilai sejauh mana aktivitas ekonomi mampu menghasilkan keuntungan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di suatu wilayah tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan pula sebagai suatu kondisi yang berkelanjutan di suatu wilayah yang diharapkan tercapainya keadaan masyarakat yang maju dan sejahtera Todaro dan Smith (dalam Ayudita & Purnomo, 2024).

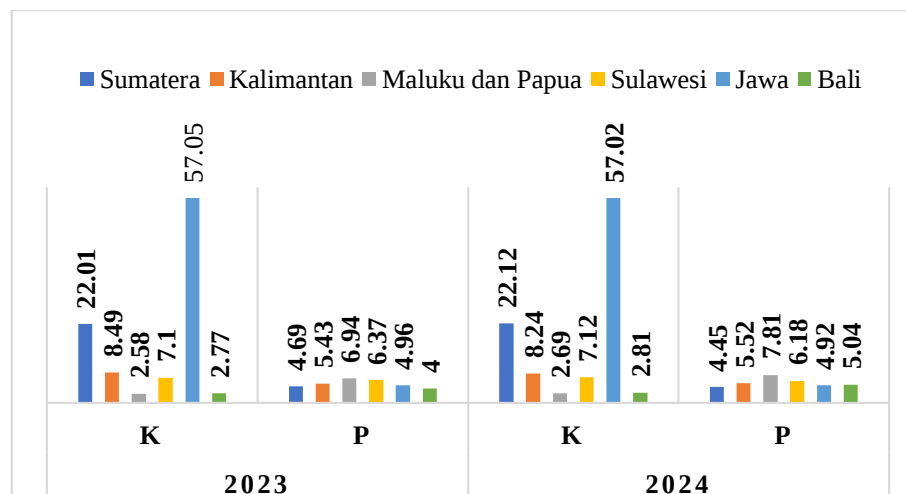
Dalam mencapai target nasional yang cepat dan inklusif, pertumbuhan ekonomi daerah perlu ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Kusumawardani & Nuraini, (2021) pertumbuhan ekonomi daerah merupakan bagian terpenting dari pembangunan nasional, yang mana tercapainya perekonomian nasional yang tinggi didorong oleh pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi dan memadai. Pertumbuhan ekonomi daerah menjadi indikator dalam menilai dan mengukur seberapa efektif keberhasilan pembangunan di suatu wilayah. Dalam peningkatannya diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto Riil di suatu wilayah.

Produk Domestik Regional Bruto Riil dapat didefinisikan pula sebagai nilai tambah yang dihasilkan oleh unit ekonomi di suatu wilayah. Semakin tinggi perekonomian suatu wilayah maka dapat dikatakan semakin baik pula

perekonomian di wilayah tersebut (Widiyanto, 2024). Jadi, Produk Domestik Regional Bruto Riil mencerminkan kinerja ekonomi suatu wilayah dalam menentukan tingkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya.

Seperti yang diketahui saat ini, bahwa Pulau Jawa merupakan pusat perekonomian Indonesia dan menjadi kontribusi PDRB terbesar terhadap PDB nasional. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan rata-rata kontribusi Pulau Jawa terhadap perekonomian nasional mencapai 57% pada lima tahun terakhir, hal tersebut dipengaruhi oleh tingkat penduduk yang padat, infrastruktur yang lebih maju serta Pulau Jawa merupakan pusat konsentrasi pemerintah dan industri yang menjadikan Pulau Jawa sebagai kawasan yang mendominasi roda perekonomian nasional.

Berikut merupakan ilustrasi terkait pertumbuhan dan kontribusi produk domestik regional bruto yang ada di 6 Pulau di Indonesia selama dua tahun terakhir.



Gambar 1. 1 Pertumbuhan dan Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Pulau di Indonesia (Persen)

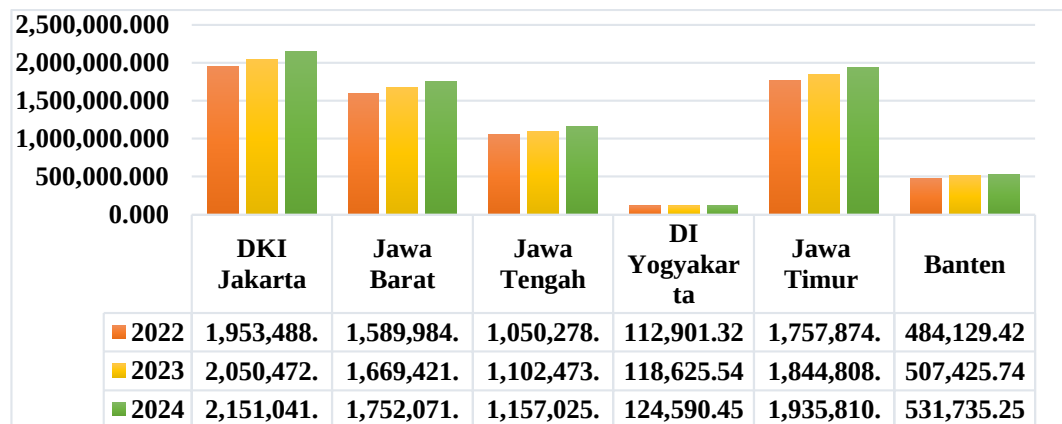
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) data diolah.

Berdasarkan gambar 1.1 diatas, menunjukan selama dua tahun terakhir Pulau Jawa menunjukan posisi dengan kontribusi tertinggi terhadap Produk Domestik Bruto Nasional. Namun jika dilihat dari presentase pertumbuhan, Pulau Jawa relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan Pulau Maluku dan Papua yang menunjukan presentase pertumbuhan yang tinggi walaupun kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto Nasionalnya rendah. Hal tersebut terjadi karena Pulau Jawa memiliki basis ekonomi dan tahapan pembangunan yang sudah matang, selain itu keterbatasan lahan, kepadatan penduduk dan pasar yang sudah jenuh membuat ekspansi terbatas sehingga pertumbuhan sulit melaju dengan cepat. Berbeda dengan Pulau lain seperti Maluku dan Papua yang memiliki kontribusi rendah terhadap Produk Domestik Regional Bruto namun pertumbuhannya sangat tinggi dikarenakan berada dalam fase awal pembangunan, basis perekonomian yang masih kecil dan juga didorong oleh ekspansi sumber daya alam, hilirisasi dan pembangunan infrastruktur sehingga mencatat pertumbuhan yang lebih tinggi meskipun kontribusinya kecil.

Meskipun Pulau Jawa dalam dua dekade terakhir mencatat kontribusi yang tinggi terhadap Produk Domestik Regional Bruto, dan merupakan wilayah dengan aktivitas perekonomian terbesar diantara Pulau lainnya, namun pada kenyataannya masih terdapat kesenjangan yang terjadi antar wilayah yang ada di Pulau Jawa. Beberapa wilayah menunjukan nilai Produk Domestik Regional Bruto yang jauh lebih tinggi, karena menjadi pusat industri, perdagangan, dan pemerintahan sedangkan wilayah lain memiliki nilai Produk Domestik Regional Bruto yang lebih

rendah karena struktur perekonomian yang berbeda dan aktivitas perekonomian yang tidak sebesar wilayah lainnya.

Berikut merupakan data terkait Produk Domestik Regional Bruto Provinsi yang ada di Pulau Jawa :



Gambar 1. 2 Produk Domestik Regional Bruto Riil Provinsi di Pulau Jawa (Milliar Rupiah)

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) data diolah.

Berdasarkan gambar 1.2 menunjukkan bahwa perkembangan produk domestik regional bruto selama tiga tahun terakhir di Provinsi yang ada di Pulau Jawa menunjukkan trend kenaikan meskipun kenaikannya tidak merata diseluruh Provinsi setiap tahunnya. Provinsi DI Yogyakarta merupakan Provinsi dengan produk domestik regional bruto terendah hal tersebut dikarenakan DI Yogyakarta memiliki jumlah populasi dan wilayah yang relatif kecil sehingga terbatas dalam melakukan aktivitas perekonomian dan produksi selain itu, struktur perekonomian yang masih di dominasi oleh sektor pendidikan, pariwisata yang memberikan nilai tambah yang kecil dibandingkan dengan sektor manufaktur.

Perbedaan terlihat pada DKI Jakarta yang menunjukkan produk domestik regional bruto tertinggi setiap tahunnya hal tersebut disebabkan karena DKI Jakarta

di dominasi oleh sektor jasa, industri, pemerintahan, dan bisnis yang sangat kuat. Selain itu, tingginya produktivitas angkatan kerja serta infrastruktur lengkap menjadikan nilai output perekonomian yang semakin besar.

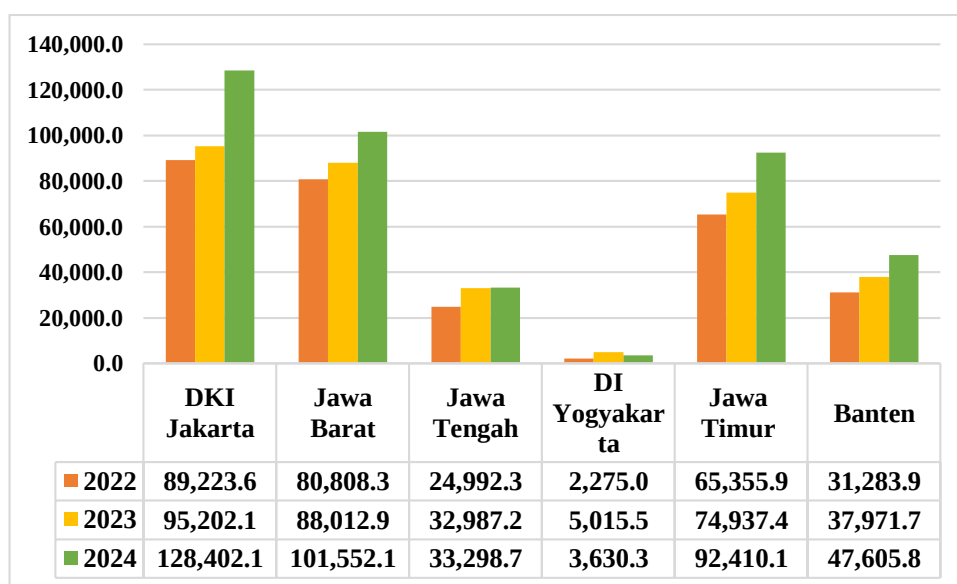
Hal tersebut tentunya menunjukkan adanya ketimpangan antar Provinsi di Pulau Jawa. Ketimpangan terjadi ketika nilai produk domestik regional bruto satu wilayah lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Perbedaan ini tentunya akan menimbulkan tantangan seperti perbedaan kesejahteraan masyarakat, kesenjangan pembangunan dan potensi terjadinya migrasi ke wilayah dengan ekonomi yang lebih maju.

Menurut teori ekonomi neo-klasik model Solow-Swan yang di kemukakan oleh Robert Solow pada tahun 1956, (dalam Sinaga et al., 2024) menjelaskan terkait faktor yang mempengaruhi pertumbuhan output suatu wilayah diantaranya yaitu akumulasi modal yang berupa investasi yang tujuannya adalah memperbesar output, kedua yaitu tenaga kerja yang mana ketika banyaknya tenaga kerja yang terserap akan membantu dalam menambah kapasitas produksi yang dihasilkan. Terakhir yang dapat mendorong output perekonomian adalah kemajuan teknologi. Faktor atau input produksi berdasarkan solow ini dianggap mampu mendorong output perekonomian suatu wilayah. Oleh karena itu, teori solow ini sangat relevan untuk memahami bagaimana modal dalam bentuk investasi domestik, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dan indeks pembangunan teknologi dan komunikasi (IP-TIK) dapat mempengaruhi output yang nantinya akan mendorong perekonomian suatu wilayah. Salah satu faktor yang dapat mendorong perekonomian adalah investasi domestik (PMDN). Investasi dalam bentuk

penanaman modal merupakan langkah awal yang harus dilakukan untuk menciptakan keberlangsungan perekonomian (Adi & Syahlina, 2020).

Investasi merupakan kegiatan penanaman modal yang dilakukan baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan harapan modal yang ditanamkan akan memperoleh keuntungan. Dapat dikatakan jika suatu wilayah memiliki investasi atau modal yang tinggi maka akan membantu dalam mempercepat pertumbuhan output untuk mendorong perekonomian di wilayah tersebut (Ariyadi & Nilasari, 2025). Tujuan dari investasi domestik (PMDN) ini untuk memperluas lapangan pekerjaan, menambah kapasitas produksi serta mendukung dalam meningkatkan output perekonomian suatu wilayah (Manihuruk et al., 2024).

Berikut merupakan data terkait investasi domestik (PMDN) diilustrasikan dalam gambar dibawah ini.



Gambar 1. 3 Investasi Domestik Provinsi di Pulau Jawa (Milliar Rupiah)

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) data diolah.

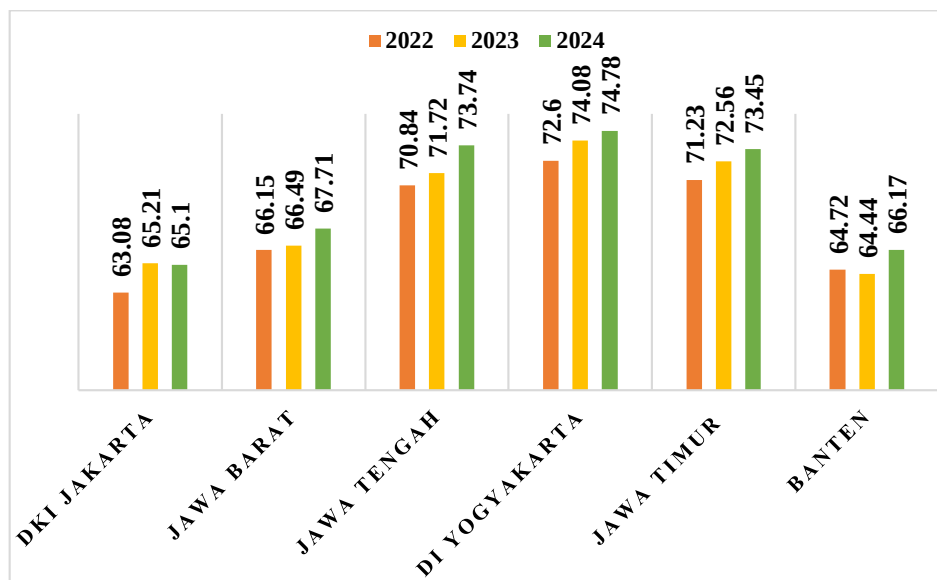
Gambar 1.3 diatas, menunjukan realisasi investasi domestik (PMDN) yang mana DKI Jakarta menunjukan nilai investasi tertinggi diantara wilayah lainnya dan

mengalami kenaikan setiap tahunnya terutama pada tahun 2024 menunjukkan investasi tertinggi sebesar 128,402.1 miliar. Disusul dengan Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan Banten yang mengalami kenaikan setiap tahunnya dengan nilai investasi tertinggi pada tahun 2024 masing-masing sebesar 101,552.1 miliar, 92,410.1 miliar, dan 47,605.8 miliar. Provinsi DI Yogyakarta merupakan daerah dengan realisasi penerima investasi domestik (PMDN) terendah sepanjang tahunnya. Namun mengalami kenaikan investasi pada tahun 2023 sebesar 5,015.5 miliar hal tersebut terjadi karena perekonomian yang mulai pulih sehingga aktivitas usaha terutama pariwisata kembali tumbuh, hal tersebut tentunya menarik minat investor dalam berinvestasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Sadid et al., (2024) menunjukkan bahwa investasi domestik (PMDN) berpengaruh signifikan terhadap produk domestik regional bruto. Sejalan dengan penelitian Aditya et al., (2025) bahwa investasi domestik (PMDN) berpengaruh signifikan terhadap produk domestik regional bruto. Namun, berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Manan & Suriadi, (2026) yang menunjukkan bahwa investasi domestik (PMDN) tidak berpengaruh signifikan terhadap produk domestik regional bruto.

Selain itu, faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan perekonomian adalah tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) yang merupakan komponen yang pada dasarnya dapat mempengaruhi pertumbuhan output perekonomian. Semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja suatu wilayah maka semakin besar produktivitas dalam menciptakan barang dan jasa yang nantinya akan mendorong peningkatan output suatu wilayah (Syamsuddin et al., 2021).

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) menunjukkan seberapa besar penduduk dengan usia kerja yang memasuki angkatan kerja (Wariyanti & Rahmayani, 2025). Berikut diilustrasikan dalam gambar di bawah ini.



Gambar 1. 4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi di Pulau Jawa (Persen)

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) data diolah.

Gambar 1.4 diatas, menunjukkan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di beberapa Provinsi di Pulau Jawa yang bervariasi. Provinsi dengan tingkat penyerapan angkatan kerja (TPAK) tertinggi selama tiga tahun terakhir adalah Provinsi DI Yogyakarta hal tersebut terjadi karena wilayah ini dikenal dengan budaya kewirausahaan yang kuat, memiliki kesempatan kerja yang mudah untuk dijangkau terutama dalam sektor pariwisata, jasa dan usaha kecil, sehingga mendorong banyaknya penduduk untuk aktif bekerja dan membuat tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di wilayah ini lebih tinggi. Disusul Provinsi Jawa Timur yang mana menunjukkan trend yang stabil dari tahun ke tahunnya. Masyarakat di wilayah ini memiliki budaya dan etos kerja yang tinggi sehingga mampu

mendorong produktivitas perekonomian. Disusul oleh Provinsi Jawa Tengah keberadaan sektor industri dan pertanian mampu meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja.

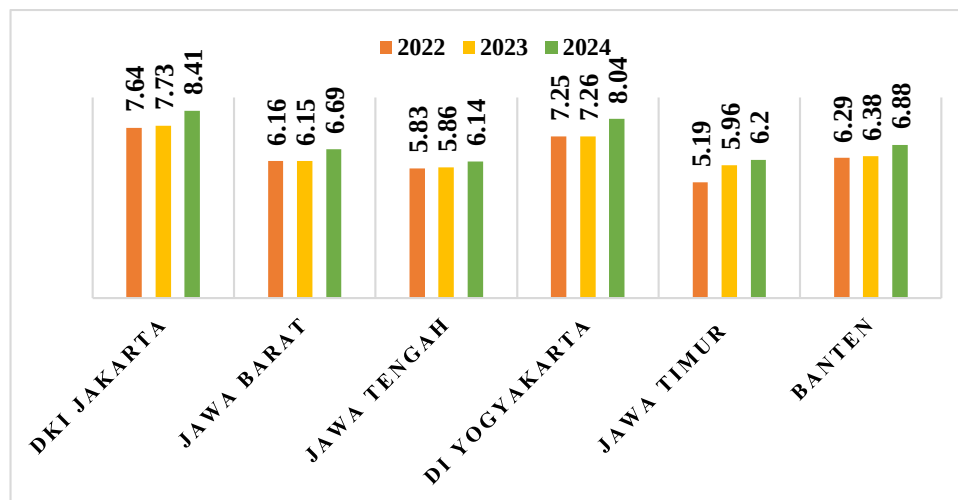
Provinsi dengan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) terendah adalah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Hal tersebut dikarenakan akibat mobilitas penduduk yang tinggi ke wilayah dengan status sebagai pusat ekonomi. Di wilayah ini, meskipun penduduk usia kerja banyak, namun penduduk yang bekerja cenderung sedikit. Urbanisasi menumpuk pada usia yang seharusnya merupakan bagian angkatan kerja. Ketiga wilayah ini merupakan target urbanisasi, karena banyaknya imigran yang tertarik mencari peluang kerja di wilayah ini. Namun tingginya urbanisasi tersebut tidak selalu diikuti dengan kenaikan tingkat partisipasi angkatan kerja dikarenakan berbagai faktor seperti ketidaksesuaian keterampilan kerja, terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia, dan persaingan tenaga kerja sehingga tidak mampu dalam menyerap angkatan kerja secara optimal.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati et al., (2023) menunjukkan bahwa TPAK berpengaruh signifikan terhadap produk domestik regional bruto. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Febrianti, (2026) bahwa TPAK berpengaruh signifikan terhadap produk domestik regional bruto. Namun berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Ulfa & Rajab, (2023) yang menunjukkan bahwa TPAK berpengaruh tidak signifikan terhadap produk domestik regional bruto.

Selain itu, adanya teknologi dapat membawa perubahan yang besar dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks perekonomian, penggunaan teknologi

yang merata diyakini dapat meningkatkan produktivitas, memperluas jangkauan pasar dan mendorong sektor baru yang lebih inovatif.

Berikut merupakan gambar perkembangan IP-TIK di beberapa Provinsi di Pulau Jawa.



Gambar 1. 5 Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Provinsi di Pulau Jawa (Indeks)

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) data diolah.

Berdasarkan gambar 1.5 diatas, terlihat bahwa Provinsi DKI Jakarta menunjukkan nilai IP-TIK yang lebih tinggi dibandingkan Provinsi yang lainnya. Nilai IP-TIK tertinggi DKI Jakarta yaitu pada tahun 2024 yang mendekati angka indeks 8,41. Provinsi DI Yogyakarta juga menunjukkan nilai IP-TIK yang tinggi dan stabil setelah DKI Jakarta. Sementara Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah menunjukkan nilai IP-TIK terendah selama tiga tahun terakhir.

Pola yang terlihat menunjukkan adanya perbedaan pemerataan dan kemajuan teknologi antar Provinsi di Pulau Jawa. Wilayah DKI Jakarta, DI Yogyakarta yang memiliki nilai IP-TIK yang tinggi cenderung memiliki infrastruktur teknologi yang baik, akses mengenai informasi yang sangat luas, serta tingkat literasi digital yang

sangat tinggi. Tentunya hal tersebut dapat mendorong aktivitas ekonomi yang dinamis dan inovatif di wilayah tersebut. Sementara wilayah yang memiliki IP-TIK rendah diperlukan peningkatan infrastruktur dan pemanfaatan teknologi agar tidak tertinggal dalam perekonomian digital. Teknologi informasi merupakan faktor penting yang dapat mempercepat perubahan ekonomi, meningkatkan efisiensi produksi dan dapat memperluas pasar. Namun belum meratanya kemajuan teknologi dapat mempengaruhi perekonomian di suatu wilayah.

Penelitian yang dilakukan oleh Athilla & Aida, (2025) menunjukkan bahwa IP-TIK berpengaruh secara signifikan terhadap produk domestik regional bruto. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Haikal & Anward, (2023) bahwa IP-TIK berpengaruh signifikan terhadap produk domestik regional bruto. Namun berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Theophilia & Wijaya, (2023) bahwa IP-TIK berpengaruh tidak signifikan terhadap produk domestik regional bruto.

Berdasarkan fenomena diatas menunjukkan bahwa tingginya nilai produk domestik regional bruto riil di Pulau Jawa tidak selalu diikuti dengan peningkatan pertumbuhan perekonomian. Hal tersebut mengindikasikan adanya permasalahan struktural dalam perekonomian yang perlu dikaji lebih mendalam. Selain itu, faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap output ekonomi berupa investasi domestik, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), dan indeks teknologi informasi dan komunikasi (IP-TIK) menjadi semakin penting saat ini. IPTIK yang mengalami peningkatan diyakini mampu meningkatkan produktivitas yang akan

mendorong kenaikan ekonomi namun dalam pemanfaatnya belum merata disetiap daerah.

Kebaruan dari penelitian ini adalah IP-TIK yang memiliki peranan yang strategis dalam membantu produktivitas perekonomian khususnya di beberapa Provinsi di Pulau Jawa. Melalui penelitian ini diharapkan dapat membantu beberapa pihak dalam pengambilan kebijakan di Pulau Jawa.

Berdasarkan fenomena, *research gap* diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Investasi Domestik, Tingkat partisipasi Angkatan Kerja dan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Bukti Empiris Untuk Pulau Jawa Tahun 2016-2024)”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan diatas :

1. Bagaimana pengaruh Investasi Domestik, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi IP-TIK secara parsial terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Pulau Jawa tahun 2016-2024?
2. Bagaimana pengaruh Investasi Domestik, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi IP-TIK secara bersama-sama terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Pulau Jawa tahun 2016-2024?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Investasi Domestik, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi IP-TIK secara parsial terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Pulau Jawa tahun 2016-2024.
2. Untuk mengetahui pengaruh Investasi Domestik, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi IP-TIK secara bersama-sama terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Pulau Jawa tahun 2016-2024.

1.4. Kegunaan Hasil Penelitian

Setelah penelitian selesai, diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah kajian literatur terutama dalam bidang ekonomi pembangunan. Khususnya mengenai determinan yang mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto di wilayah dengan aktivitas perekonomian yang tinggi seperti Pulau Jawa. Selain itu juga penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman wawasan terkait permasalahan yang diteliti, terutama terkait faktor yang mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto di suatu wilayah.
2. Bagi pemerintah, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bukti empiris terkait faktor-faktor yang mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto di Pulau Jawa dan juga mendukung pemerintah dalam membuat kebijakan agar tepat sasaran.
3. Bagi pihak lain, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sumber acuan dan literatur dalam melakukan penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto.

1.5.Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah Indonesia yaitu, Pulau Jawa yang terdiri dari enam Provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Banten. Dengan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan situs pendukung lainnya.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan terhitung mulai dari bulan Januari 2026. Penelitian dilakukan dengan diawali pengajuan judul, pengumpulan data, pembuatan usulan penelitian dan seminar usulan penelitian. Adapun tabel jadwal penelitian adalah sebagai berikut:

